



**LAPORAN EVALUASI
HASIL PELAKSANAAN RENJA TA. 2023
TRIWULAN IV
(Per 31 Desember 2023)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

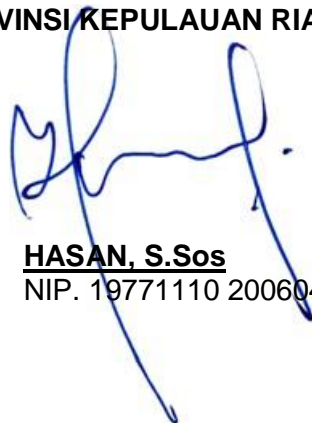
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV (Per 31 Desember 2023) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HASAN, S.Sos
NIP. 19771110 200604 1 010

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah	4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	7
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
3.1. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	12
3.2. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	13
3.3. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	14
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM ATAU KEGIATAN RENJA	15
4.1. Capaian Target Indikator Sasaran	15
4.2. Capaian Target Indikator Program	16
4.3. Capaian Target Indikator Kegiatan	17
4.4. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan	19
4.5. Pencapaian Target Anggaran	22
BAB V KENDALA ATAU PERMAALAHAN YANG DIHADAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	24

BAB VI	PENUTUP	25
	A. Kesimpulan	25
	B. Rekomendasi	25

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan 5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 7
Tabel 3.1	Perbandingan DPA, Renja, dan Renstra Tahun 2023 9
Tabel 4.1	Pencapaian Target Indikator Sasaran 15
Tabel 4.2	Pencapaian Target Indikator Kinerja Program 16
Tabel 4.3	Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan 17
Tabel 4.4	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan 19
Tabel 4.5	Pencapaian Target Anggaran 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah Provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 919);

20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 938).

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2023 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2023 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam renja perangkat daerah tahun 2023;
2. Mendeskripsikan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja renja perangkat daerah tahun 2023;
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2023 dan penyusunan rencana kerja tahun 2024.

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Metode evaluasi renja perangkat daerah meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi s/d TW I	Interval Nilai Evaluasi s/d TW II	Interval Nilai Evaluasi s/d TW III	Interval Nilai Evaluasi s/d TW IV	Status
1.	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2.	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3.	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4.	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5.	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan renja Dinas Komunikasi dan informatika pada tahun 2023 adalah **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
2. Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi;
3. Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi (*smart service*);
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2023	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2023
I.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Skala Nilai	2,90			
1.		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Skala Nilai	80	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	80
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	%	25		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	25

			program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	
2.		Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi;	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
3.		Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (<i>smart service</i>);	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25
			Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	82,93		Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	82,93
4.		Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	70,33	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	70,33
5.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	BB

BAB III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA DPA-P DAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perbandingan DPA-Perubahan, Renja, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan DPA-Perubahan, Renja, Renstra Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA-P	RENJA-P	RENSTRA
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	√	√	√
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	X	√
2.16.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	√
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	X	X	√
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X	X	√
2.16.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	X	X	√
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah Pada SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	X	X	√

2.16.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√
2.16.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	X	X	√
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	X	X	√
2.16.01.1.05.03	Pendaftaran dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	X	X	√
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	X	X	√
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X	X	√
2.16.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	X	X	√
2.16.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	X	X	√
2.16.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	X	X	√
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	√
2.16.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X	X	√
2.16.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	X	√
2.16.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	X	√
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	X	X	√
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjangan Tamu	√	√	√
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	X	X	√
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X	X	√
2.16.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	X	√
2.16.01.1.07.03	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X	X	√
2.16.01.1.07.04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X	X	√
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	X	X	√
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	X	X	√
2.16.01.1.07.09	Pengadaan Sarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	X	√
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	X	√
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√

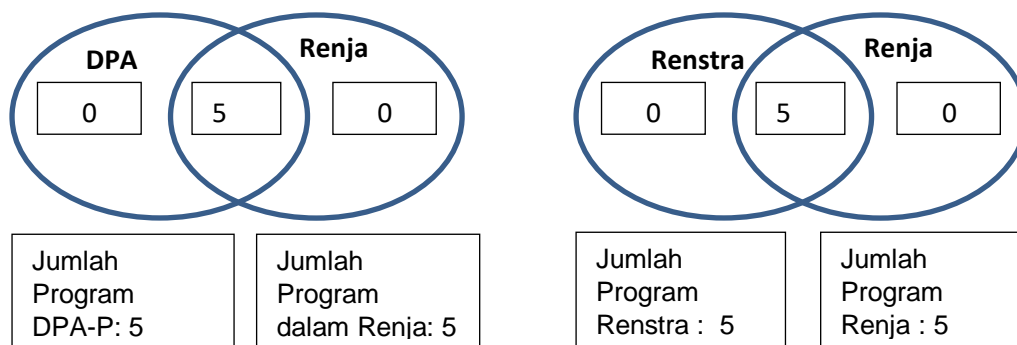
2.16.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	X	X	√
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	√	√	√
2.16.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	X	X	√
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.02	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	√	√	√
2.16.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.02.1.01.01	Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	X	X	√
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	X	X	√
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	√	√	√
2.16.02.1.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	√	√	√
2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	X	X	√
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	√	√	√
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	√	√	√
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	√	√	√
2.16.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	X	X	√
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	√	√	√
2.16.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	√	√	√
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	√	√	√

2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	X	X	√
2.16.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	X	X	√
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	√	√	√
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	√	√	√
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	√	√	√
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	X	X	√
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	X	X	√
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (Gcio)	X	X	√
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	√	√	√
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	√	√	√
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	√	√	√
2.20.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	√	√	√
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	√	√	√
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	X	X	√
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	X	X	√
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	X	X	√
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	X	X	√
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	X	X	√
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	√	√	√
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	√	√	√
2.21.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	√	√	√
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan	X	X	√
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	X	X	√
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	X	X	√
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
2.21.02.1.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	√	√	√
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√

3.1 Perbandingan Jumlah Program dalam DPA-Perubahan, Renja dan Resntra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA-Perubahan dan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dapat dilihat pada *flowchart* berikut:

Flowchart 1 :
Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023



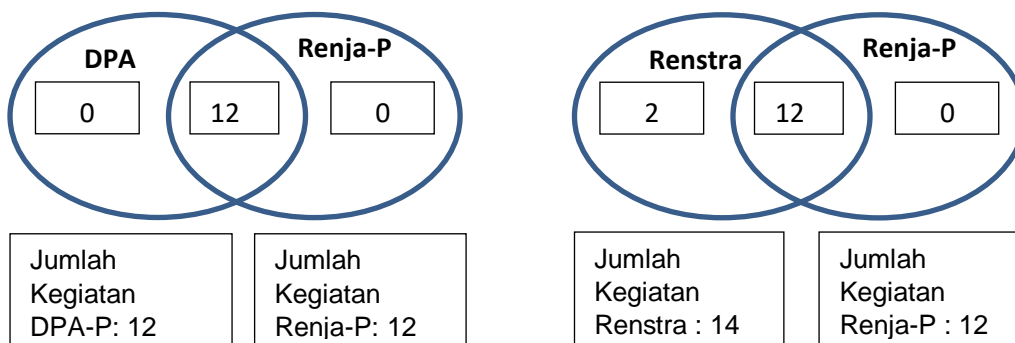
Dari *flowchart* diatas dapat dilihat bahwa:

Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 (DPA-Perubahan) sama dengan jumlah program pada Renja 2023 maupun Renstra 2021-2026.

3.2 Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam DPA-Perubahan, Renja Perubahan dan Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA-Perubahan, Renja Perubahan dan Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dapat dilihat pada *flowchart* berikut:

Flowchart 2 :
Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA-Perubahan, Renja dan Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023



Dari *flowchart* diatas dapat dijelaskan:

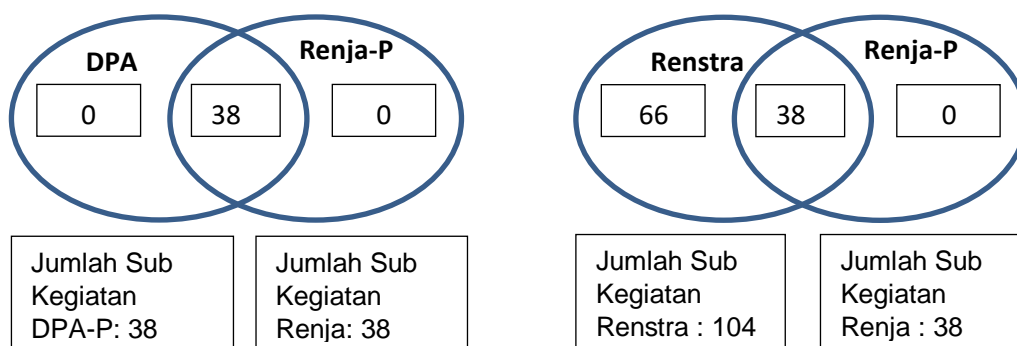
Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2023 sama dengan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023. Sementara pada Dokumen

Renstra 2021-2026 terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dianggarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023.

3.3 Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan dalam DPA-Perubahan, Renja Perubahan dan Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA-Perubahan, Renja Perubahan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat pada *flowchart* berikut:

Flowchart 3 :
Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA-Perubahan, Renja dan Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023



Dari *flowchart* diatas dapat dilihat bahwa:

Jumlah Sub kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2023 sama dengan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023. Sementara pada Dokumen Renstra 2021-2026 terdapat 66 (dua) Sub Kegiatan yang tidak dianggarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA

4.1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran

Adapun capaian kinerja indikator sasaran renja perubahan yang dievaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Pencapaian Target Indikator Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
I	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Skala nilai	2,90	2,68	92,41	ST	
1		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skala nilai	80	96,05	120,06	ST	
			Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	25	25	100	ST	
2		Terwujudnya Penyelenggaraan Satu Data Berbasis Elektronik yang Terintegrasi;	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	ST	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	ST	

3		Meningkatnya Layanan Publik Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi yang Terintegrasi (<i>Smart Service</i>);	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	25	26,03	104,92	ST	
			Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	T	
4		Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	70,33	60,31	85,75	T	
5		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	%	BB	BB	100	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sasaran** dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar **92,41%** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi** namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara rata-rata capaian kinerja indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar **99,60** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Adapun status pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 terdiri dari status Sangat Tinggi sebanyak 6 Indikator Sasaran dan status Tinggi sebanyak 2 Indikator Sasaran.

4.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program

Capaian indikator kinerja program renja perubahan yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Pencapaian Target Indikator Kinerja Program

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target Tahun 2023	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skala nilai	80	96,05	120,06	ST	
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program	%	25	25	100	ST	

		Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi						
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	ST	
		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	ST	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	25	26,03	104,92	ST	
		Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	T	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	70,33	60,31	85,75	T	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase	100	100	100	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Program** dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar **99,60%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun status pencapaian kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 terdiri dari status Sangat Tinggi sebanyak 6 Indikator Program dan status Tinggi sebanyak 2 Indikator Program.

4.3 Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian indikator kinerja kegiatan renja perubahan yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target Tahun 2023	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	
		Persentase Terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	
		Persentase Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	

3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	ST	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	ST	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengunjung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	ST	
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100	100	100	ST	
		Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi Sesuai Dengan Strategi Komunikasi	%	100	100	100	ST	
		Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang Telah Ditetapkan	%	100	100	100	ST	
		Persentase Komunitas Masyarakat /Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi	%	100	100	100	ST	
8	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan, Kelembagaan dan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Provinsi yang Diselenggarakan Secara Daring Dengan Memanfaatkan Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	%	72	82,81	100	ST	
		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	T	
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar	%	70	74,42	100	ST	
9	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahdaerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	%	100	97,67	97,67	ST	
		Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai	%	3	2,1	70	S	
		Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	%	11,11	0	0	SR	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapatkan Rekomendasi dari BPS	%	100	100	100	ST	
		Persentase Survey Statistik Sektoral yang Mendapatkan Rekomendasi dari BPS	%	100	100	100	ST	
		Persentase Kelengkapan Metadata Indikator Statistik Sektoral	%	100	100	100	ST	
11	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasia dan atau Aplikasi Persandian	%	97,74	100	100	ST	

		Persentase Kegiatan Strategis yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal	%	80	100	100	ST	
		Persentase Sistem Elektronik/Asset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	100	100	100	ST	
12	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Titik yang Diamankan Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	%	100	100	100	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Kegiatan** dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebesar **94,15%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun status pencapaian kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 terdiri dari status Sangat Tinggi sebanyak 22 Indikator Kegiatan, status Tinggi sebanyak 1 Indikator Kegiatan, status Sedang sebanyak 1 Indikator Kegiatan dan status Sangat Rendah sebanyak 1 Indikator Kegiatan.

4.4 Capaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Adapun capaian kinerja indikator sub kegiatan renja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target Tahun 2023	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	100	ST	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100	ST	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	100	ST	
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	12	100	ST	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	3	3	100	ST	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	50	50	100	ST	
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	3	100	ST	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	20	20	100	ST	

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target Tahun 2023	Kategori Kinerja (Status)	Ket
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	300	300	100	ST	
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100	ST	
11.	Fasilitasi Kunjangan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	1	100	ST	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	ST	
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100	ST	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100	ST	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	3	100	ST	
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	10	100	ST	
17.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Dokumen	12	12	100	ST	
18.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dokumen	12	12	100	ST	
19.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	1	1	100	ST	
20.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Dokumen	1	1	100	ST	
21.	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	2	2	100	ST	
22.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	Dokumen	1	1	100	ST	
23.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Orang	75	75	100	ST	
24.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Dokumen	1	1	100	ST	
25.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Dokumen	1	1	100	ST	
26.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Unit	1	1	100	ST	
27.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi	Dokumen	4	4	100	ST	
28.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Unit	41	37	90,24	T	
29.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan	Dokumen	1	1	100	ST	

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Target Tahun 2023	Kategori Kinerja (Status)	Ket
	Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi						
30.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen	3	2	66,67	S	
31.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pudat data pemeritanh daerah yang dikelola	Unit	41	42	100	ST	
32.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dokumen	2	2	100	ST	
33.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis eletronik yang dikembangkan	Unit	13	15	100	ST	
34.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Layanan	1	1	100	ST	
35.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1	100	ST	
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	1	1	100	ST	
37.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	OPD	41	41	100	ST	
38.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	OPD	41	41	100	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** rata-rata pencapaian kinerja pada TW IV sebesar 98,87% terdiri dari status Tinggi (ST) sebanyak 36 Indikator Sub Kegiatan, status Tinggi (T) sebanyak 1 Indikator Sub Kegiatan dan status sedang (S) sebanyak 1 Indikator sub kegiatan.

4.5 Pencapaian Target Anggaran

Adapun realisasi anggaran renja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Pencapaian Target Anggaran

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Realisasi Anggaran	Kategori Kinerja Anggaran (Status)
		Pagu DPA	Realisasi		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	53.867.149.463	53.471.770.452	99,27	ST
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.365.261.760	12.188.820.563	99,27	ST
I.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.626.763	180.080.436	99,70	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Realisasi Anggaran	Kategori Kinerja Anggaran (Status)
		Pagu DPA	Realisasi		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.008.000	89.771.136	99,74	ST
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.618.763	90.309.300	99,66	ST
I.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.253.540.987	9.109.663.177	98,45	ST
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.716.515.487	8.573.269.177	98,36	ST
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	537.025.500	536.394.000	99,88	ST
I.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.964.000	25.874.226	99,65	ST
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.964.000	25.874.226	99,65	ST
I.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.378.930	451.712.011	99,41	ST
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.736.000	9.466.000	97,23	ST
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.998.700	9.956.800	99,58	ST
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.812.100	29.390.500	98,59	ST
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.104.400	60.502.900	97,42	ST
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.664.400	9.352.000	96,77	ST
11.	Fasilitas Kunjangan Tamu	13.600.000	13.590.000	99,93	ST
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.463.330	319.453.811	99,99	ST
I.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.353.261.080	2.328.703.363	98,96	ST
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.161.800	42.136.000	99,94	ST
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.311.099.280	2.286.567.363	98,94	ST
I.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.490.000	92.787.350	95,18	ST
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.730.000	81.054.350	94,55	ST
16.	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	11.760.000	11.733.000	99,77	ST
II.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	32.370.494.243	32.253.307.232	99,64	ST
II.1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	32.370.494.243	32.253.307.232	99,64	ST
17.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	137.640.692	132.932.523	96,58	ST
18.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.464.325.298	1.459.666.174	99,68	ST
19.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.294.654.408	3.284.680.595	99,70	ST
20.	Pelayanan Informasi Publik	201.135.120	197.490.952	98,19	ST
21.	Layanan Hubungan Media	15.038.235.144	15.033.768.549	99,97	ST
22.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	6.935.704.554	6.885.472.519	99,28	ST
23.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	5.065.860	3.773.000	74,48	S
24.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	884.858.428	848.383.920	95,88	ST
25.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	765.000.000	765.000.000	100	ST
26.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publikpemerintah Daerah Provinsi	3.643.874.739	3.642.139.000	99,95	ST
III.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.689.973.224	8.595.766.906	98,92	ST
III.1.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.066.276.912	5.053.695.775	99,75	ST
27.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	114.256.788	112.506.081	98,47	ST
28.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.952.020.124	4.941.189.694	99,78	ST
III.2.	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.623.696.312	3.542.071.131	97,75	ST
29.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	89.591.007	88.478.852	98,76	ST
30.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	161.773.723	160.204.978	99,03	ST
31.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.076.006.564	2.049.645.043	98,73	ST
32.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	121.458.751	119.739.670	98,58	ST
33.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.084.081.323	1.035.460.704	95,52	ST
34.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	39.775.885	38.558.833	96,94	ST
35.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	51.009.059	49.983.051	97,99	ST
IV.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi	120.929.678	119.231.343	98,60	ST
IV.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi	120.929.678	119.231.343	98,60	ST
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektor	120.929.678	119.231.343	98,60	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Realisasi Anggaran	Kategori Kinerja Anggaran (Status)
		Pagu DPA	Realisasi		
V.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	320.490.558	314.644.408	98,18	ST
V.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	248.736.364	246.490.308	99,10	ST
37.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	248.736.364	246.490.308	99,10	ST
V.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	71.754.194	68.154.100	94,98	ST
38.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	71.754.194	68.154.100	94,98	ST

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika TW IV (31 Desember 2023) sebesar **Rp. 53.471.770.452,-** atau **99,27%** dengan kategori kinerja anggaran **Sangat Tinggi**.
2. Status pencapaian realisasi anggaran pada TW IV (31 Desember 2023) terdiri dari status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 37 Sub Kegiatan dan status Sedang (S) sebanyak 1 Sub Kegiatan.

BAB V

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA

Dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau ditemukan beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran TW IV (31 Desember 2023) telah melebihi yang telah ditetapkan (target anggaran TW IV sebesar **98%** sementara realisasi TW IV sebesar **99,27%**).
2. Capaian indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau masih belum mencapai target yang telah ditetapkan (target 2,90 sementara capaian kinerja 2,68) hal ini disebabkan belum adanya arsitektur SPBE, Road Map SPBE, Rencana Induk SPBE, Manajemen Resiko SPBE dan Audit TIK secara berkala.
3. Terdapat 1 indikator kegiatan dengan capaian kinerja masih sangat rendah hal ini disebabkan belum adanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) karena infrastruktur TIK belum memadai atau belum terstandarisasi,

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2023 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 5 (lima) Program yang terbagi atas 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rata-rata pencapaian kinerja **98,76%** (kategori Sangat Tinggi) dan realisasi keuangan mencapai **Rp. 53.471.770.452,-** atau **99,27%** (kategori Sangat Tinggi).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2023 pada triwulan IV telah berjalan dengan baik.